

Peran demokrasi dan pemerintahan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) = The role of democracy and governance on enhancement of Indonesian export to the Organization of the Islamic Cooperation (OIC) countries

Aditya Ranga Yogatama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20390353&lokasi=lokal>

Abstrak

Penetapan Piagam OKI yang baru dalam KTT OKI ke sebelas di Dakkar, 2008, menjadi momentum bagi negara-negara OKI untuk memperkuat demokrasi dan kelembagaan dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran demokrasi dan pemerintahan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI selama periode 1998-2012 dengan menggunakan augmented gravity model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan pemerintahan Indonesia, serta pemerintahan negara-negara OKI sebagai tujuan ekspor Indonesia berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI. Sebaliknya, demokrasi di negara-negara OKI berpengaruh negatif dan signifikan. Negara-negara OKI berpendapatan rendah cenderung mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup.

.....

The enforcement of new OIC Charter at the 11th OIC Summit in Dakar, 2008, has become a momentum for OIC member states to reassert the importance of democracy and institutional reform in promoting economic and trade cooperation among its members. This study aims to explore the role of democracy and governance on the enhancement of Indonesian export to OIC countries during the period 1998-2012 by using augmented gravity model. The results showed that both democracy and governance in Indonesia have positive and significant effect in enhancing Indonesian export to OIC countries. The similar result is also found in the governance of OIC countries. On the other hand, democracy in OIC countries are having negative and significant effect on the same matter. Low-income OIC countries have a tendency to implement a more closed trade policy.